

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Kebijakan Politik

Sangat penting dalam penulisan tesis ini penulis mengurai tentang kebijakan politik, agar terbangun suatu frekuensi pemikiran yang sama dalam mehami tema penelitian ini.

Politik dalam pengertian beberapa ahli dapat dipahami sebagai pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya, menurut Joyce Mitchell dalam kutipan Muhammad Rifai.<sup>1</sup>

Masih dalam kutipan Rifai, J. Barents menyatakan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, pada bagian ini mempelajari kehidupan masyarakat dengan maksud negara tersebut mampu melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>2</sup>

Sementara itu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) kata politik bermakna pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan; sistem pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan. Juga bermakna urusan dan tindakan, kebijaksanaan, serta siasat.<sup>3</sup>

Kebijakan itu sendiri dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dimaknai sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman

---

<sup>1</sup> Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 16.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *versi offline*, edeisi III, data mengacu pada <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>

dan dasar dari sebuah rencana dalam upaya mencapai tujuan pelaksanaan pekerjaan kepemimpinan serta cara bertindak.<sup>4</sup>

David Easton mendefinisikan kebijakan politik secara sederhana berupa suatu akibat dari aktivitas pemerintah, begitu sebagaimana dikutip H. A. R Tilaar dan Riant Nugroho.<sup>5</sup> Kebijakan Publik (*Public Policy*) bagi Thomas R Dey adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.<sup>6</sup>

Maka dari sini kita bisa membangun sebuah pemahaman bahwa kebijakan politik adalah kosep pedoman dan dasar untuk mencapai tujuan kepemimpinan dalam sebuah tatanegara dan sistem pemerintahan.

Lebih ringkas kita bisa memahami kebijakan politik ialah keputusan yang dibuat oleh negara, yang dibuat pemerintah, sebagai strategi untuk mencapai cita-cita Negara dalam rangka merubah kehidupan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tema penelitian tesis ini analisis berkaitan dengan kebijakan politik tidak bisa dilepaskan dengan politik pendidikan. Sebab dengan politik peran pendidikan akan tampak dan efektif - efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga dalam membentuk karakter masyarakatnya.

Politik pendidikan, bila mencoba mencerna secara mendalam dan seksama agaknya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang barang kali

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> H. A. R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: 2012), 183.

<sup>6</sup> Ibid, 184.

akan memutar otak. Sebenarnya politik mengatur pendidikan ataukah dari pendidikan politik itu dilahirkan? Sebab keduanya bagai mata uang yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling bahu membahu dalam satu porses untuk mengubah dan bahkan membentuk karakteristik suatu bangsa di suatu negara.

Sederhana bila merujuk *Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam* tulisannya Suwarno, politik pendidikan merupakan pendekatan atau metode yang berdasar pada kondisi budaya nasional dalam rangka mempengaruhi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang demi mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>7</sup> Melalui politik pendidikan akan terbentuk panduan pendidikan yang tepat, kokoh, dan kuat dengan harapan pendidikan mampu melahirkan sumber daya manusia yang kecerdasan intelektual, emosional dan sosial.

Peran politik di dunia pendidikan sangatlah dibutuhkan untuk mengatur alur pendidikan yang tepat. Dalam sebuah negara politik pendidikan harusnya ditempatkan pada sebuah kerangka tatakelola sistem pendidikan sesuai dengan kultur masyarakat dan target pendidikan sebagaimana yang telah menjadi visi politik pemerintah.<sup>8</sup>

Dari adanya konsep politik pendidikan tentunya pada akhirnya akan melahirkan kebijakan publik yang disusun dan dibuat oleh pemerintah, tentu sesuai dengan lingkup seperangkat nilai-nilai spesifik yang menjadi latar

---

<sup>7</sup> Suwarno, "Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam", *Jurnal As-Salam Vol. 1*, 2016, 64-65.

<sup>8</sup> Ahmad Baedowi, "Politik Pendidikan atau Pendidikan Tak Berpolitik?", *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan dan Keagamaan*, Vol. 3, No. 4, 2005, 107.

pandangan dalam merumuskan sebuah kebijakan, yang berkenaan dengan hal-hal teknis pendidikan berupa pengawasan, kurikulum, administrasi sekolah dan sebagainya. Berkaitan dengan hal ini Ahmad Baedowi yang mengembangkan pemikiran Marshall, Norton, dan Sergiovanni mencoba mengkalsifikasi 4 sumber nilai yang dianggap fundamental dalam merumuskan sebuah kebijakan di bidang pendidikan, yaitu: Pilihan (*choice*) adalah sebuah opsi penentu aksi seperti mandat negara untuk menentukan jenis pendidikan yang akan diselenggarakan; kualitas (*quality*) tentu nilai ini merupakan sesuatu yang terbaik dan harus sesuai dengan pandangan dan harapan publik itu sendiri; efisiensi (*efficiency*) nilai ini mencakup dua aspek yang harus menjadi pedoman dalam mengambil sebuah kebijakan publik, misalnya dari aspek ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan seharusnya efisien dari segi pembiayaan, juga akuntabilitas maksudnya pendidikan setidaknya harus ada sistem kontrol atau organisasi birokrasi yang *good governance* yang bertanggung jawab dengan fungsi menjaga kestabilan pendidikan; dan kesamaan (*equity*) artinya penggunaan sumberdaya publik didistribusi berdasarkan perbedaan kebutuhan manusia.<sup>9</sup>

Disadari betul bahwa kewenangan dan kekuasaan saja belumlah cukup, dibutuhkan kemampuan negara untuk mengimplementasikan situasi sosial, agama, dan karakter negara tersebut. Kemampuan ini bisa diuraikan menjadi sangat luas, mencakup keharusan memiliki wawasan yang mumpuni, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan serta kemampuan

---

<sup>9</sup> Ibid. 109.

menggali dan mengelola pembiayaan. Dengan demikian melalui pengelolaan yang desentralistik, “diharapkan pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, bermanfaat bagi daerah dan juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan desentralisasi tersebut tidak dikehendaki terjadinya kemunduran dalam pendidikan dan tidak juga justru melemahkan semangat integrasi nasional.”<sup>10</sup>

Politik pendidikan atau kebijakan politik dalam suatu negara memang merupakan suatu dasar yang harus ada. Sebagai bentuk centralisasi pendidikan, baik berhubungan dengan kontrol, fasilitas, pengelolaan, dan sebagainya. Dan berikut peneliti mencoba menyampaikan produk-produk kebijakan politik tentang pendidikan di Indonesia.

Kebijakan publik penyelenggaraan pembangunan Indonesia Pasca reformasi ditata dengan pola desentralistik, yaitu dengan lahirnya undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang dilengkapi dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hanya saja kebijakan publik ini menurut hemat penulis terdapat kelemahan, diantaranya adalah adanya kesenjangan kesejahteraan antara pusat dengan daerah. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah diperbaharui lagi dengan lahirnya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Munculnya berbagai peraturan dan perundang-undangan ini adalah dalam rangka

---

<sup>10</sup> Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Ed), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi Cita karya Nusa Kerjasama dengan Depdiknas; Bappenas, 2001, 4.

perbaikan sistem yang selama ini berlaku, sehingga kedepan akan lebih baik lagi.<sup>11</sup>

Pemerintah Orde baru menetapkan kebijakan publik dibidang pendidikan berupa undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional. Kebijakan ini ditetapkan pada saat kebijakan publik tentang penyelenggaraan pembangunan menganut pola yang cenderung sentralistik, yaitu melalui Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini menyebutkan bahwa negara kesatuan RI dibagi kedalam daerah-daerah otonom diselenggarakan melalui tiga pelaksanaan asas yaitu, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asa pembantuan. Pasal 2 UU tersebut menetapkan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat II yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Adapun tujuan daripada otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>12</sup>

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal; 50, 51 dan 52 secara khusus mengatur tentang pengelolaan pendidikan tingkat pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa sifat desentralistik dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan nasional. Namun didalamnya memberikan panduan mengenai mekanisme desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu antara lain siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional,

---

<sup>11</sup> Masykur H Mansyur, Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam, *Majalah Ilmiah Solusi Unsika*, Vol. 10 No. 22 Ed. Mar - Mei 2012, 3.

<sup>12</sup> Ibid.

bagaimana standar nasional pendidikan, siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi dan sebagainya.<sup>13</sup>

Dari alur tulisan ini sudah dapat ditarik satu pemahaman bahwa kebijakan publik lahir untuk menjawab suatu persoalan dan masalah-masalah masyarakat yang memunculkan rumusan-rumusan langkah yang dibuat oleh aktor atau sejumlah aktor yang dalam hal ini adalah pemerintah. Robert Eyestone dalam catatannya Suwarno berpandangan bahwa kebijakan publik ialah hubungan sesuatu unit pemerintah dengan lingkungan.<sup>14</sup>

Berbicara soal politik pendidikan lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai aset negara terbesar. Karena dengan lembaga pendidikan negara dapat menciptakan manusia yang berkualitas, manusia yang mampu menggapai kerakyatan Indonesia, manusia paripurna, dan yang lainnya. Seperti yang pernah ditulis oleh Anis Baswedan dalam sambutan Hari Pendidikan Nasional kemarin bahwa “Aset terbesar Indonesia adalah manusia Indonesia, jelasnya manusia yang berkualitas, manusia yang harus dipandang mampu menggapai kerakyatan Indonesia, membuat generasi lebih bersemangat untuk berkreasi, menuntut ilmu, dan beramal.”

Melihat dari peranan lembaga pendidikan yang telah disebutkan diatas. Sangat ironi sekali ketika lembaga pendidikan dijadikan sebagai sasaran kepentingan politik. Sedangkan dengan mengamati fenomena politik akhir-akhir ini kepentingan politik sudah diabaikan melainkan beralih pada politik

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Suwarno, 66.

kepentingan, dengan berahlihnya peranan politik tersebut yang tujuan utamanya hanya kepentingan untuk membesarkan partai, sehingga partai itu mendapat simpati rakyat, dipilih oleh mayoritas rakyat, dan memperoleh kekuasaan. Selebihnya, lupa akan cita-cita dan kepentingan politik itu sendiri.

Dalam hal ini peneliti ingin menyampaikan bahwa politik pendidikan bukan bermaksud untuk mengatur pendidikan untuk kepentingan politik. Sebab bila pola pikir semacam ini terus berkembang maka kehancuran pendidikan sudah sedekat hidung. Artinya, nilai manfaat dan nilai guna politik akan beralih fungsi bukan untuk memajukan negara, bukan untuk membentuk karakter bangsa, dan bukan untuk membangun peradaban bangsa. Melainkan membesarkan aktor politik itu sendiri.

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik untuk membentuk dan melatih pola pikir serta pola laku peserta didik menuju pola pikir dan pola laku yang lebih baik dan lebih berkemanusiaan. Melalui pendidikan peserta didik akan mampu memahami masalah humanisasi yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Secara aksiologi masalah humanisasi ini selalu dipandang sebagai permasalahan yang utama, dengan memaksa pikiran manusia untuk berpikir tentang masalah dehumanisasi sebagai sebuah realitas sejarah.

Untuk menjawab dan mengatasi masalah dehumanisasi tersebut harapan besar yang bisa diletakkan hanya kepada pendidikan. Dengan pendidikan peserta didik diharapkan mampu berkembang menjadi manusia yang lebih

kreatif, kritis, dan inovatif untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam realitas sosialnya. Selanjutnya, akan muncul pertanyaan pendidikan seperti apa yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi lebih kreatif, kritis, dan inovatif tersebut?

Paulo Freire menunjukkan bahwa; apabila sistem pendidikan yang diterapkan dalam lembaga pendidikan hanya terbatas pada *sistem bank*, maka harapan untuk merubah pola pikir dan pola laku peserta didik tidak bisa sepenuhnya bisa disandarkan pada pendidikan, dan bahkan Freire mengatakan itu merupakan kegagalan dalam pendidikan.

Sebab, sistem pendidikan tersebut cenderung membuat dikotomi terhadap apa saja. Biasanya dalam sistem ini terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan keadaan masyarakat tertindas secara keseluruhan, misalnya: guru mengajar, murid diajar; guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tau apa-apa; guru berpikir, murid dipikirkan; guru bercerita, murid patuh mendengarkan, guru menentukan peraturan, murid diatur; guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menyetujui; guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatan gurunya; guru memilih bahan dan isi pelajaran, murid (tanpa diminta pendapatnya) menyesuaikan diri dengan pelajaran tersebut; guru mencampur adukkan kewenangan ilmu pengetahuan dan kewenangan jabatannya, yang dilakukan untuk menghalangi kebebasan murid; dan guru adalah subyek dalam proses belajar, murid adalah obyek belaka.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, (tk: LP3ES, tt), hlm. 45.

Hal yang demikian menunjukkan konsep pendidikan bank ini memandang manusia tak ubahnya makhluk yang dapat disamakan dengan sebuah benda dan gampang diatur.

Semakin banyak tabungan yang dimasukkan dalam otak peserta didik, semakin kurang mengembangkan daya kritis yang dapat mereka peroleh dari keterlibatan dunia sebagai pengubah dunia. Semakin penuh mereka menerima peran pasif yang disodorkan terhadap dirinya, maka mereka akan semakin cenderung menerima apa adanya dalam memandang realitas yang tepotong-potong sebagaimana yang tertanam dalam diri mereka.

Sistem pendidikan gaya bank inilah yang dimanfaatkan oleh kaum penindas untuk mengurangi dan atau menghapuskan daya kreasi para murid, serta menumbuhkan sikap mudah percaya terhadap peserta didik. Sesungguhnya, kepentingan kaum penindas adalah “mubah kesadaran kaum tertindas, bukan situasi yang menindas mereka”.<sup>16</sup>

Selanjutnya, Freire menyatakan bahwa pendidik harus memandang peserta didik sebagai makhluk yang sadar, dan kesadarannya harus diarahkan ke arah dunia. Mengganti tujuan pendidikan sebagai usaha tabungan dengan penghadapan pada masalah-masalah manusia dalam hubungannya dengan dunia. Pendidikan hadap-masalah (*problem-posing*) yang menjawab hakikat kesadaran. Yakni, kesadaran diatas kesadaran.

Melalui sistem pendidikan hadap-masalah bentuk dikotomi kegiatan guru-murid dihapuskan. Pelaksanaan pendidikan hadap-masalah ini pertama

---

<sup>16</sup> Ibd, 55

kali menuntut adanya pemecahan masalah kontradiksi antara guru dan murid. Hubungan dialogis yang harus ada antara guru dan murid untuk sama-sama mengamati obyek yang sama. Sebagai bentuk refleksi bersama, secara otomatis antara murid dan guru sama-sama memperbaharui refleksinya.

Pendidikan hadap-masalah menekankan murid agar dihadapkan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan kehadiran mereka di dan bersama dengan dunia, dengan demikian murid akan semakin ditantang dan berkewajiban untuk menjawab tantangan tersebut.

Pendidikan sebagai praktik kebebasan – berlawanan dengan pendidikan sebagai praktik dominasi – menolak bahwa manusia adalah suatu yang abstrak, terencil, berdiri sendiri, dan tidak terikat pada dunia; juga menolak anggapan bahwa dunia ada sebagai sebuah realitas yang terpisah dengan manusia. Refleksi yang sejati menganggap tidak ada manusia abstrak dan tidak ada dunia tanpa manusia, melainkan manusia dalam kaitannya dengan dunia.<sup>17</sup>

Dalam hubungan ini maka kesadaran dan dunia secara bersamaan memperluas cakupan pemahamannya, ia akan tampil untuk mengarahkan perhatiannya kepada gejala yang selama ini hadir secara tidak jelas. Melalui pendidikan hadap-masalah manusia mengembangkan kemampuannya untuk memahami secara kritis cara mereka *meng-ada* dalam dunia dengan dan dimana mereka menemukan diri sendiri, mereka akan terkonstruksi bahwa

---

<sup>17</sup> Ibid, 65-66

dunia bukan dalam keadaan statis melainkan sebagai realitas yang berada dalam proses, dalam gerak perubahan.

Dengan demikian sistem pendidikan ini mendorong para guru dan murid untuk menjadi subyek dari proses pendidikan dengan membuang otoritarianisme serta intelektualisme yang mengasingkan, yang juga memungkinkan manusia untuk membenahi pandangan mereka yang keliru terhadap realitas. Sebab, pendidikan hadap-masalah adalah praksis pendidikan pembebasan yang manusiawi, menganggap sebagai dasariah bahwa manusia korban penindasan harus berjuang bagi pembebasannya sendiri.

Gambaran yang peneliti dari pandangan Paulo Freire ini untuk membuka pandangan pembaca betapa sangat krusial. Seperti pula yang digambarkan Mohammad Thoha dalam tulisan yang bertajuk *Politik Pendidikan Islam (Potret Sejara Periode Klasik Sampai Abad Pertengahan)*, ia menggambarkan secara terang benderang bagaimana kekuasaan atau politik sangat berperan dalam memajukan ilmu pengetahuan.

Ia memulai tulisannya dengan kondisi politik yang begitu rumit antara bangsa barat dan bangsa Arab. Barat dengan kecanggihan teknologi dilancarkanlah hegemoni dalam bentuk penjajahan dan intervensi kebijakan ekonomi dan kebijakan politik. Dalih utamanya untk membuat ketergantungan umat Islam terhadap mereka.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mohammad Thoha, 24.

Dari permulaan itu merembetlah pada akhirnya pada bagaimana para penguasa muslim memeluk pendidikan agar tetap di tegakkan. Barat sudah banyak melakukan plagiasi ilmu pengetahuan dari umat muslim. Penemuan-penemuan umat muslim di akui sisi oleh orang-orang Barat. Thoha melalui hasil penelitian Mehdi Nakosteen membuktikan, Barat berhutang budi terhadap Islam dalam bidang keilmuan, pembuktiannya mengambil sampel dari peran akademi Jundi Shafur di Persia.

Program akademi tersebut menjadi pusat penerjemahan ilmu pengetahuan klasik Yunani ke baha Arab, serta ilmu berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa lainnya. Diantaranya ilmu kedokteran, dan ilmu matematika. Tidak berakhir dengan kegiatan penerjemahan saja, sebagai apresiasi pemerintah terhadap kegiatan keilmuan tersebut diberikanlah penghargaan terhadap para ilmuan itu sebuah laboratorium dan vokasional demi kelancaran dan kenyamanan kinerja ilmiahnya.<sup>19</sup>

Semangat kinerja ilmiah tersebut tidak hanya bertempu pada penerjemahan saja. Penulisan buku-buku ilmiah pun muncul, lahirlah kemudian buku ensiklopedi ilmu pengetahuan dengan memuat empat puluh cabang disiplin ilmu, ia ditulis oleh penulis ternama Muhammad Ibn Ishaq al-Nadzim. Bidang eksakta juga menjadi perhatian umat muslim untuk dipelajarinya, sampai menemukan temuan rumusan astronomi, rumusan matematika, dan rumusan ilmu kedokteran. Para sultan dengan

---

<sup>19</sup> Ibid, 28-29.

bangga mempromosikan hasil penelitian dan temuan-temuan umat muslim.<sup>20</sup>

Memang pada awal-awal kegiatan ilmiah ini para ilmuwan muslim belum diperhatikan soal kesejahteraannya, dan mereka tidak mempersoalkan hal itu. Pemerintahan al-Aziz kemudian mendapat usulan dari menternya Ya'qub Ibn Killis untuk memperhatikan kesejahteraan para ilmuwan muslim. Barulah dari usulan tersebut kesejahteraan ilmuwan muslim diperhatikan, para ilmuwan sangat merasa diuntungkan dan pendidikan. Perhatian ini terus berlangsung hingga pada kerajaan Abbasiyah di Bagdad. Perdana menteri Nizham al-Mulk meremikan bayaran para ilmuwan muslim dengan mengambilkan sumber dana dari waqaf. Pihak pemerintah atau istana terus memperhatikan kesejahteraannya, jenjang penghasilan mereka disesuaikan dengan kapasitas keilmuan mereka.<sup>21</sup>

Bila ditelisik kembali peran politik pendidikan pada masa kejayaan Islam yang merupakan agama totaliter *jam'i*, yang sudah seharusnya memberi pendidikan kepada para pengikutnya untuk mengetahui pola laku Islami. Maka terlihatlah disana kesungguhan para ulama dan umara sangat memerhatikan pendidikan sebagai upaya memperkuat penanaman paham-paham keagamaan, posisi sosial politik, dan pengikutnya yang tidak hanya sebatas dukungan moral melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan dan kurikulum.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, 29-32.

<sup>21</sup> Ibid, 32-33.

<sup>22</sup> Mursal Aziz, "Politik Pendidikan pada Masa Nabi Muhammad SAW" *Jurnal Waraqat*, Vol. II, No. 1, 2017, 191-192.

Menarik sekali posisi-posisi politik ini untuk membangun sebuah bangsa dan peradaban umat Islam. Peran ulama tidak bisa melepaskan seperti yang dibicarakan sebelumnya. Ulama menjadi kekuatan pada dinamika politik pendidikan, efeknya untuk menciptakan motivasi masyarakat yang partisipatif dan kritis (kritis – partisipatif). Gerakan semacam ini menjadi modal sosial publik sebagai upaya serentak membangun kehidupan berkebangsaan dan bernegara menuju arah yang lebih baik dan mandiri.<sup>23</sup>

Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah cenderung menerapkan prinsip-prinsip politik pendidikan, sehingga penyebaran ajarannya dapat tersampaikan dengan rapi, meluas tanpa batas wilayah, dan mudah dipahami oleh para sahabat dan *tabi'in* serta samapai sekarang pun kita juga merasakan dahsyatnya didikannya.<sup>24</sup>

## **B. Biografi Nizham al-Mulk Sang Permata Politik Islam**

Pada bagian ini peneliti sangat bersemangat untuk mengurai biografi sang bapak pendidikan, semoga saja peneliti tidak berlebihan menyebutnya, yakni Nizham al-Mulk. Nama lengkap Nizham al-Mulk adalah Abu Ali Hasan ibn Ishaq, namun lebih dikenal dengan nama Nizham al-Mulk al-Tusi. Dia seorang negarawan mashur di dunia Islam, seking masyhurnya Philip K. Hitti dengan tegas menulis bahwa dia “salah satu permata sejarah politik umat Islam”. Dia lahir 10 April 1018 di Radkhan, dekat Tus, lahir

---

<sup>23</sup> Zainuddin Syarif, “Pergeseran Perilaku Politik Kiai dan Santri di Pamekasan Madura” *al-Tahrir*, vol. 16, No. 2, 2016, 295-296.

<sup>24</sup> *Ibid.* 193.

dari keluarga yang menjadi pegawai penting pada masa pemerintahan Sultan Ghaznawi – wafat 14 Oktober 1092.<sup>25</sup>

Sejak muda, Nizham al-Mulk gemar mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, termasuk kesusasteraan dan kesenian. Tahun 1054 dia bekerja menjadi wazir dibawah pemerintahan Alp Arselan. Sebagai wazir yang cerdas banyak perluasan kekuasaan yang berhasil ditaklukkan menggunakan strateginya, juga reformasi diberbagai bidang berhasil dilakukan, diantaranya; bidang pendidikan, perekonomian, kemiliteran, dan politik.<sup>26</sup>

Karir politik Nizham al-Mulk tidak serta merta menduduki jabatan sebagai wazir. Mula-mula Nizham al-Mulk bekerja sebagai sekretaris Ali ibnu Syazan al-Mu'tamad 'Alaih di Balch. Semasa bekerja dengannya Nizham al-Mulk selalu mengalami penyitaan atas hartanya setiap tahun. Lantas ia mencari pengalaman baru pada Daud ibnu Mikail as-Saljuqi, yang merupakan ayahanda dari Alp Arselan. Bersama Daud ibnu Mikail as-Saljuqi Nizham al-Mulk belajar dan menerima hadiah-hadiah. Menariknya Daud sampai-sampai mempercayakan anaknya kepada Nizham al-Mulk, ia berkata: “anggaplah ia sebagai ayahmu sendiri, dan jangan pernah kamu menyalahi apa-apa yang dinasehatkannya kepadamu!”<sup>27</sup>

Nizham al-Mulk mulai berpolitik setelah menang membantu bersiasat Alp Arselan merebut kursi sultan. Perebutan kursi sultan ini terjadi setelah wafatnya Sultan Thugrulbeg, paman dari Alp Arselan itu sendiri. Sebelum wafatnya ia pernah berwasiat bahwa yang akan menjadi penggantinya kelak

---

<sup>25</sup> Abdul Hadi WM, 324.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ahmad Syalabi, 354.

setelah wafat ialan Sulaiman ibn Daud, saudara kandung Alp. Arselan. Diangkatnya Sulaiman sebagai sultan karena kepandaiannya, ia ditunjuk karena kedekatan ibunya dengan Thugrulbeg, dan dengan memanfaatkan kedekatannya itulah ibunya membujuk agar menunjuk Sulaiman sebagai penggantinya. Dari sinilah aksi pemberontakan terjadi yang dilakukan Alp Arselan dan Syihabuddin Qatalmas. Alp Arselan memenangkan permainan tersebut atas bantuan Nizham al-Mulk, ia pun menduduki singgasana sultan.<sup>28</sup>

Kemenangan ini kemudian yang mengantarkan Nizham al-Mulk menduduki kursi wazir. Dengan diberhentikannya al-Kunduri, paman Thugrulbeg wazir yang membela mempertahankan kedudukan Sulaiman. Dari jabatan seorang wazir inilah kilau permata politik Nizham al-Mulk terbit, dikarenakan dari kecerdasan dan keliahaiannya bersiasat baik dalam hal menyelesaikan permasalahan besar bahkan juga dalam mengatur strategi peperangan.

Kelihaian di medan tempur, Nizham al-Mulk tentu mendapatkan kemenagan gilang-gemilang. Ia sering kali mendampingi Alp Arselan menghadapi pertempuran-pertempuran, suatu keberhasilan penaklukan Alp Arselan seperti anggapan dirawayatkan Philip K. Hitti perluasannya sampai kesegala penjuru, hingga ke wilayah Asia Barat. Pada tahun kedua sang singa pahlawan (Alp Arselan) merebut Ani ibu kota Armenia terus menduduki provensi Bizantium. Tahun 1071 lagi-lagi sang Singa berhasil

---

<sup>28</sup> Ibid.

mengangkat bendera dalam peretempuran penting di Manzikart dan berhasil meringkuk Kaisar Romanus Geogenes.<sup>29</sup> pun tidak ketinggalan juga mendampingi pangeran muda Malik Syah pada setiap penyerbuan, dimana keduanya berhasil melumpuhkan pertahanan musuh sekaligus benteng-bentengnya.<sup>30</sup>

Perebutan tahta kekuasaan kembali bergejolak setelah meninggalnya Alp Arselan tahun 465 H, perebutan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Lagi-lagi Nizham al-Mulk mengambil tindakan untuk mempertahankan kekuasaan Malik Syah yang usianya belum genap 18 tahun. Akhirnya, kemenangan itu berhasil di peroleh setelah melalui peperangan terhadap kaum pemberontak kerajaan pada suatu sisi sekaligus berhasil menekuk lutut para amir-amir Bani Saljuk pada pihak lain.<sup>31</sup>

Sebuah kisah menarik saat peperangan berlangsung sebagaimana Philip K. Hitti tulis ketika Malik Syah mengunjungi masjid di Thusi, sultan bertanya pada Nizham al-Mulk munajat apa yang kau panjatkan kepada Tuhan ketika di masjid itu, Nizham menjawab “saya berdoa meminta agar sultan mencapai kemenangan dalam berperang dengannya”. “Doa ku berbeda,” Malik Syah menimpali, “Aku memohon kepada Tuhan agar kemenangan dalam peperangan ini jatuh kepada siapa yang pantas dan layak memimpin umat muslim dengan baik.”<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, penj. R. Cecep Lukman Yasin, dkk. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), 604.

<sup>30</sup> Ahmad Syalabi, 354-355.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Philip K. Hitti, 606-607.

Kecerdikan berpolitik dan mengatur siasat Nizham al-Mulk berhasil mencapai stabilitas politik sekaligus mampu melenyapkan masalah-masalah. Dalam riwayat Khalikan sebagaimana dikutip dalam catatan Ahmad Syalabi, bahwa perjalanan pemerintahan Sultan Malik Syah juga mengalami pemberontakan yang mendalang dari pemberontakan terhadap Sultan Malik Syah ialah pamannya sendiri, meski demikian pemberontakan itu belum sempat berkobar lantaran segera ditumpas oleh tentara sultan dan berhasil menawannya. Dari tawanan ini pula di peroleh kantong kulit yang berisi surat-surat hasutan dari panglima Sultan Malik Syah untuk melakukan pemberontak. Untuk mengatasi hal ini Sultan Malik Syah tidak langsung melakukan tindakan, melainkan ia memanggil sang Wazir Nizham al-Mulk agar memberikan tindakan terhadap para pemberontak.

Menariknya pada kisah ini Nizham al-Mulk bukan malah membaca surat-surat yang diberikan Sultan Malik Syah tersebut, ia membakar surat tersebut dengan maksud menjaga nama-nama pemberontak. Dengan tindakannya yang bijak itulah Nizham al-Mulk berhasil mengambil hati para panglima dan prajurit pemberontak tersebut, dari sinilah akhirnya sumpah setia terhadap Sultan Malik Syah dalam hatinya terpatri.<sup>33</sup> Keputusan-keputusan bijaknya membuat pertahanan singga sana Sultan Malik Syah tetap kuat. Nizham al-Mulk pada keadaan apapun selalu menjadi permata yang sinarnya tak pernah padam.

---

<sup>33</sup> Ahmad Syalaby, 356.

Kemilau politik Nizham al-Mulk yang sangat menonjol ini akhirnya Sultan Malik Syah merasa sangat berhutang budi, begitupun dengan ayahnya dulu. Perjalanan politik Nizham al-Mulk semakin bertambah hari semakin berjalan cemerlang, sampai pada suatu masa semua kebijakan politik Sultan Malik Syah yang berdarah muda tersebut sepenuhnya diserahkan kepadanya sambil mengucapkan sumpah khusus kepadanya “anda bagiku adalah seorang ayah”.

“Pengatur Kerajaan” Philip K. Hitti menyebutnya, Malik Syah memerintah selama 20 tahun dalam genggamannya seluruh kekuasaan sultan ditangani. Sementara sultan selama kurun waktu tersebut menumpahkan hobinya berburu dan duduk manis di atas singgasana.<sup>34</sup>

Nizham al-Mulk yang cerdas dan berbakat di bidang politik. Berhasil menjadikan dirinya seorang yang sangat bermanfaat terhadap umat. Suatu keberhasilan yang ia capai setelah memegang segala urusan ialah menghapuskan cukai dan pajak. Ia telah menghilangkan asumsi radikal terhadap kelompok asy-Ariyah yang biasanya dibacakan di mimbar-mimbar jum'at. Yang tak kalah pentingnya sikap terhadap rakyat penuh kasih sayang dan begitu baik.<sup>35</sup>

Tahun 1074 – 1075 H menyarankan sultan Malik Syah melakukan konferensi bersama para astronom untuk memperbaharui kalender Persia. Hasilnya, merupakan suatu penemuan gemilang sebuah kalender Jalali.

---

<sup>34</sup> Philip K. Hitti, 607.

<sup>35</sup> Ahmad Syalaby, 357.

Modern menilai kalender tersebut “agak lebih akurat daripada kalender kita.”<sup>36</sup>

Dalam riwayat yang ditulis as-Subki, Nizham al-Mulk mempunyai riwayat pendidikan yang tinggi. Ia pernah belajar hadist di kota Ashfihan, dari Muhamad ibnu Ali al-Adib dan Abu Mansur Syuja’, di Kota Naisabur kepada ustad Abu Qosim al-Qusyairi, di Bagdad kepada Abi al-Khattab ibnul Bahtar dan lain-lainnya. Ia juga pernah mengajar di Bagdad pada masjid jamik al-Mahdi dan di madrasahnyanya sendiri yang santri-santrinya merupakan para imam-imam besar, dan sejumlah ulama besar meriwayatkan hadis daripadanya. Menariknya lagi ia sangat suka membuka lingkaran-lingkaran diskusi ilmiah meskipun ia sendiri tidak ahli dibidangnya, sampai ia berkata sebagaimana di kutip Ahmas Syalabi, “Aku bukanlah ahli dalam bidang ini, akan tetapi saya ingin untuk menjadikan diri saya turut berada dalam kereta yang ditumpangi oleh para pemangku hadis-hadis Rasulullah. SAW.”<sup>37</sup>

Berkat keberhasilannya dalam menghapus kutukan terhadap kelompok asy-Ariyah, dari situ pula motivasi-motivasi super merasuk kepada ulama besar asy-Ariyah untuk kembali pulang ke tanah kelahirnya dan meneruskan dakwah di daerahnya masing-masing. Disamping itu Nizham juga memberikan hadiah terhadap para ahli agama dan ilmu pengetahuan. Dengan maksud ia ingin melacak siapa saja yang pantas atau bisa bermanfaat atas ilmunya untuk kepentingan rakyat. Bila ia pantas menjadi

---

<sup>36</sup> Phili K. Hitti, 607.

<sup>37</sup> Ahmad Syalaby, 357.

pejabat maka Nizham mengangkatnya, dan yang ilmu pengetahuannya luas diangkatnya untuk mengajarkan ilmunya, dengan ditanggung segala keperluan hidupnya. Terkadang pula disembarkan ke pelosok-pelosok pedalaman untuk menyebarkan ilmu dan menegakkan mana yang benar dan melenyapkan yang bhatil.<sup>38</sup>

Sekiranya tidak berlebihan bila penulis menyebut Nizham al-Mulk sebagai permata politik Islam. Dari sekian jasa dan karyanya ia telah menghidupkan cahaya dalam gulita pengucilan para ulama. Yang terpenting pembangunan sekolah-sekolah, asrama, masjid, dan segenap fasilitas keilmuan merupakan hal utama yang menjadi sumber utama cahaya peradaban kaum muslimin di negeri yang dipimpinya.

Maka pun tidak berlebihan bila ia juga disebut-sebut namanya pada sekolah-sekolah yang dikenal sebagai “Nizhamiyah”. Sebab berkat buah pikir dan buah tangannya segala sekolah mulai dari perkotaan hingga ke pelosok-pelosok benar-benar hasil karyanya, bukan karya orang lain. Ialah wazir yang tersemat pada mahkotanya sebagai “Bapak Pendidikan”.

Perlu juga diungkap disini Nizham al-Mulk tak hanya pandai bersiasah, melainkan ia juga pandai berbudaya. Sebut saja disini risalah luar biasa karya Nizham al-Mulk *Siyasah namah*, sebuah buku yang menerangkan seni pemerintah.<sup>39</sup> Risalah ini disusun atas kompetisi yang diadakan sultan Malik Syah untuk memberikan pendapat atas pemerintahan yang baik kepada para pejabatnya.

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Philip K. Hitti, 607.

Meski pada akhir perjuangannya ia harus menghadapi duka yang mendalam. Atas keberhasilannya yang gemilang ia harus menanggung kecemburuan Sultan Malik Syah terhadapnya. Dari situlah Nizham al-Mulk yang begitu besar jasanya atas kerajaan Sultan Malik Syah harus mengakhiri hidupnya. Sultan Malik Syah merancang sebuah siasat untuk membunuh Nizham al-Mulk, sebagaimana catatan Syalabi bahwa Nizham al-Mulk mati dibunuh oleh seorang pemuda dari keluarga Dailami golongan Bathiniyah yang menyamar sebagai seorang pengemis.<sup>40</sup>

Riwayat yang lain mengungkap kematian Nizham al-Mulk merupakan korban pertama dalam rentetan pembunuhan yang dilakukan oleh sekte Ismailiyah.<sup>41</sup> Dan bersamaan dengan kematiannya, berakhir pulalah periode keemasan tiga penguasa pertama Dinasti Saljuk tahun 1062.

---

<sup>40</sup> Ahmad Syalaby, 359.

<sup>41</sup> Philip K. Hitti, 607.